

DAFTAR PUSTAKA

- Anim Wiyana, Sultan Syah. (2016). *Accesibility Determinant and The Presentation of Regional Financial Statment Towards The Accountability of Regional Financial Management. Qualitative and Quantitative Research Review, Vol.1, Issue 3, 2016. ISSN No: 2462-1978, eISSN No: 2462-2117.*
- Dedy Aries Poae, David P. E. Saerang. (2013). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitasnya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Accountability Vol. 2 No. 1, Juni 2013.*
- Faud, Ramli. (2015). *Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah.* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fauziyah, Miftahul Reza dan Handayani, Nur. (2017). *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 6, Nomor 6, Juni 2017 ISSN : 2460-0585.*
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasni Yusrianti, et al.,. (2013). *The Effect Balance Sheet Disclosure and Accessibility Financial Statment on The Accountability of Regional Financial Management in Palembang City. The 14th FourA Annual Conference 2013, Penang, Malaysia, October 28-30, 2013.*
- Indrawati. (2015). *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis Konvergensi Teknologi Komunikasi dan Informasi.* Bandung : PT Refika Aditama.
- Masyhur, Mirza. (2017). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai. JOM Fekon, Vol. 4 No.1 (Februari) 2017.*
- Muhammad Alqodri. (2015). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan, dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan*

- Daerah Faculty Of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia.*
JOM. Fekon Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Nurlaili. (2016). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Faculty Of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia.*
JOM. Fekon Vol. 3 No. 1 Februari 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Salomi J. Hehanussa. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. 2nd CBAM (Conference in Business, Accounting, and Management) World Class Islamic University, Sultan Agung Islamic University ISSN 2302-9791.Vol.2 No. 1 May 2015.*
- Sekaran, Uma. (2014). *Research Methods for Business: Metode Penelitian untuk Bisnis (Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Aliyah, Aida Nahar. (2012). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*. Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189.
- Sinurat, Marja. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sudaryono. (2015). *Metodologi Riset di Bidang TI (Panduan Praktis, Teori, dan Contoh Kasus)*. Yogyakarta: Andi.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2016). *Metode Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- _____. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Superdi. (2017). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. JOM Fekon, Vol. 4 No.1 (Februari) 2017.
- Supriadi, Bambang, et al., (2017). *Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintahan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- www.mataramkota.go.id.

(HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN)